

**PERAN DINAS KOPERASI, UMKM, DAN TENAGA KERJA
DALAM MENANGANI KASUS PENGANGGURAN TERDIDIK
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



oleh:

FRIDA KARIMA

NIM 4121146

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PERAN DINAS KOPERASI, UMKM, DAN TENAGA KERJA
DALAM MENANGANI KASUS PENGANGGURAN TERDIDIK
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



oleh:

FRIDA KARIMA

NIM 4121146

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frida Karima

NIM : 4121146

Judul Skripsi : “Peran Dinas Koperasi, UMKM, Dan Tenaga Kerja dalam Menangani Kasus Pengangguran Terdidik di Kabupaten Pekalongan”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Frida Karima

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Frida Karima

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Frida Karima

NIM : 4121146

Judul Skripsi : **Peran Dinas Koperasi, UMKM, Dan Tenaga Kerja Dalam Menangani Kasus Pengangguran Terdidik Di Kabupaten Pekalongan**

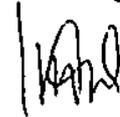
Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juni 2025

Pembimbing.



Indah Purwanti, M.T.

NIP. 19870107201903201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kejen Pekalongan. www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Frida Karima**

Nim : **4121146**

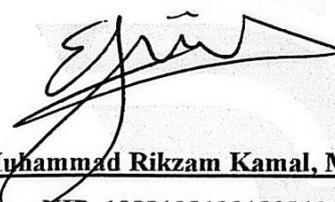
Judul Skripsi : **Peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja dalam Menangani Kasus Pengangguran Terdidik di Kabupaten Pekalongan**

Dosen Pembimbing : **Indah Purwanti M.T.**

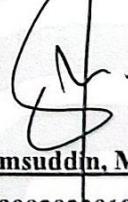
Telah diujikan pada Jumat, 26 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I


Muhammad Rikzam Kamal, M.Kom
NIP. 198812312019031011

Penguji II


Svamsuddin, M.Si
NIP. 199002022019031011

Pekalongan, 14 Juli 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. A. M. Muh. Khatidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

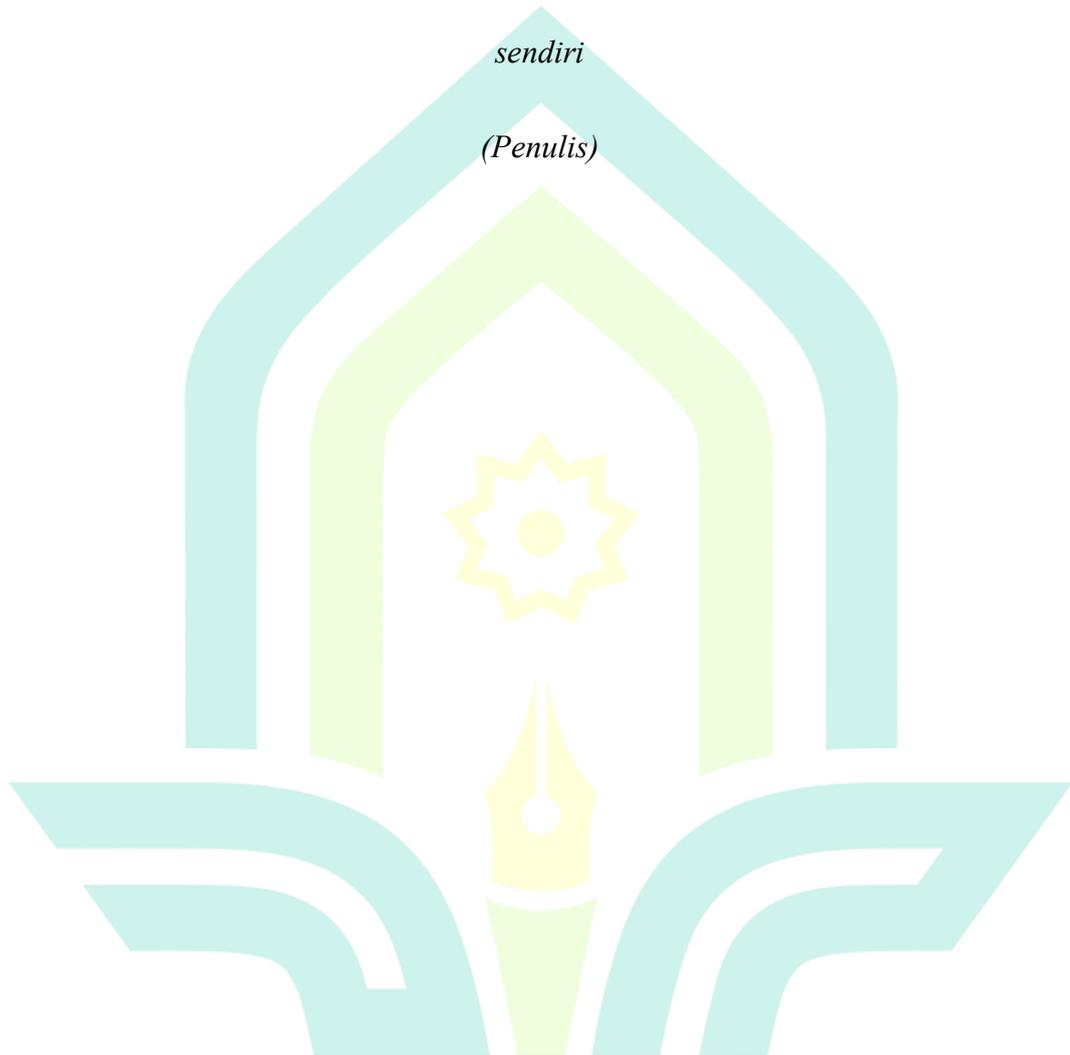
MOTTO

Berhenti bukan pilihan ketika yang diperjuangkan adalah masa depan.

(Anonim)

*Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang mengerti self-worth-nya
sendiri*

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini . semoga hasil penelitian ini dapat memberikan infoormasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Ibu saya, Ibu Khanafiyah yang telah memberikan dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik dari segi materi ataupun non materi.
2. Almameter tercinta saya, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dosen Pembimbing Ibu Indah Purwanti, M.T yang selalu memberikan arahan selama saya mengerjakan skripsi ini.
4. Dosen Wali saya Bapak Versiandika Yudha Pratama, M.M yang sudah memberikan support dan arahan dari awal maba sampai saya di semestar akhir ini.

5. Sahabat-sahabat saya selama menempuh perkuliahan di UIN, teman seperjuangan yang sekarang juga masih berusaha untuk lulus. Tetap semangat untuk kita semua, semoga di kehidupan yang akan datang kita bisa menjadi orang yang selalu berhasil dan sukses dunia akhirat.
6. Serta, seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungannya selama ini



ABSTRAK

FRIDA KARIMA, Peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja dalam Menangani Kasus Pengangguran Terdidik di Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam menangani kasus pengangguran terdidik. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan peran dinas dalam perumusan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengurangan angka pengangguran terdidik di wilayah tersebut, serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, pengangguran terdidik, serta stakeholder terkait lainnya. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan telah menyelenggarakan pelatihan kerja di BLK seperti pelatihan menjahit, komputer, dan teknik sepeda motor. Dinas juga memfasilitasi program pemagangan ke berbagai perusahaan dan menyalurkan pencari kerja melalui kerja sama dengan dunia usaha. Selain itu, diselenggarakan job fair yang mempertemukan langsung pencari kerja dengan perusahaan. Informasi lowongan kerja disebarakan melalui saluran Telegram dan WhatsApp.

Kata Kunci: pengangguran terdidik, kebijakan ketenagakerjaan, peran dinas, Kabupaten Pekalongan, strategi penanggulangan.

ABSTRACT

FRIDA KARIMA, The Role of the Department of Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises, and Manpower in Handling Educated Unemployment Cases in Pekalongan Regency.

This study aims to examine and analyze the role of the Department of Cooperatives, MSMEs, and Manpower in Pekalongan Regency in addressing the issue of educated unemployment. The focus is on the department's implementation of programs and policies related to reducing educated unemployment, and identifying the challenges faced in the process.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants include officials from the department, educated unemployed individuals, and related stakeholders. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, involving data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was tested using source and technique triangulation.

The results show that the Department has organized job training at the BLK, including sewing, computer, and motorcycle repair courses. It has facilitated internships with various companies and helped channel job seekers through partnerships with industries. Job fairs were held to connect job seekers with employers. Job vacancies were disseminated through the Telegram and Whatsapp channel.

Keywords: educated unemployment, employment policy, agency role, Pekalongan Regency, mitigation strategy

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. A.M. Khafidz Ma'Shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Muhammad Aris Safi'i, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Indah Purwanti, M.T. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Versiandika Yudha P., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan perkuliahan dan ilmunya dari awal hingga akhir

dan memberikan arahan pembuatan judul skripsi sebagai langkah awal tersusunnya skripsi ini.

7. Pihak Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja yang sudah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan.
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan spiritual.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 17 Juni 2025



Frida Karima

DAFTAR ISI

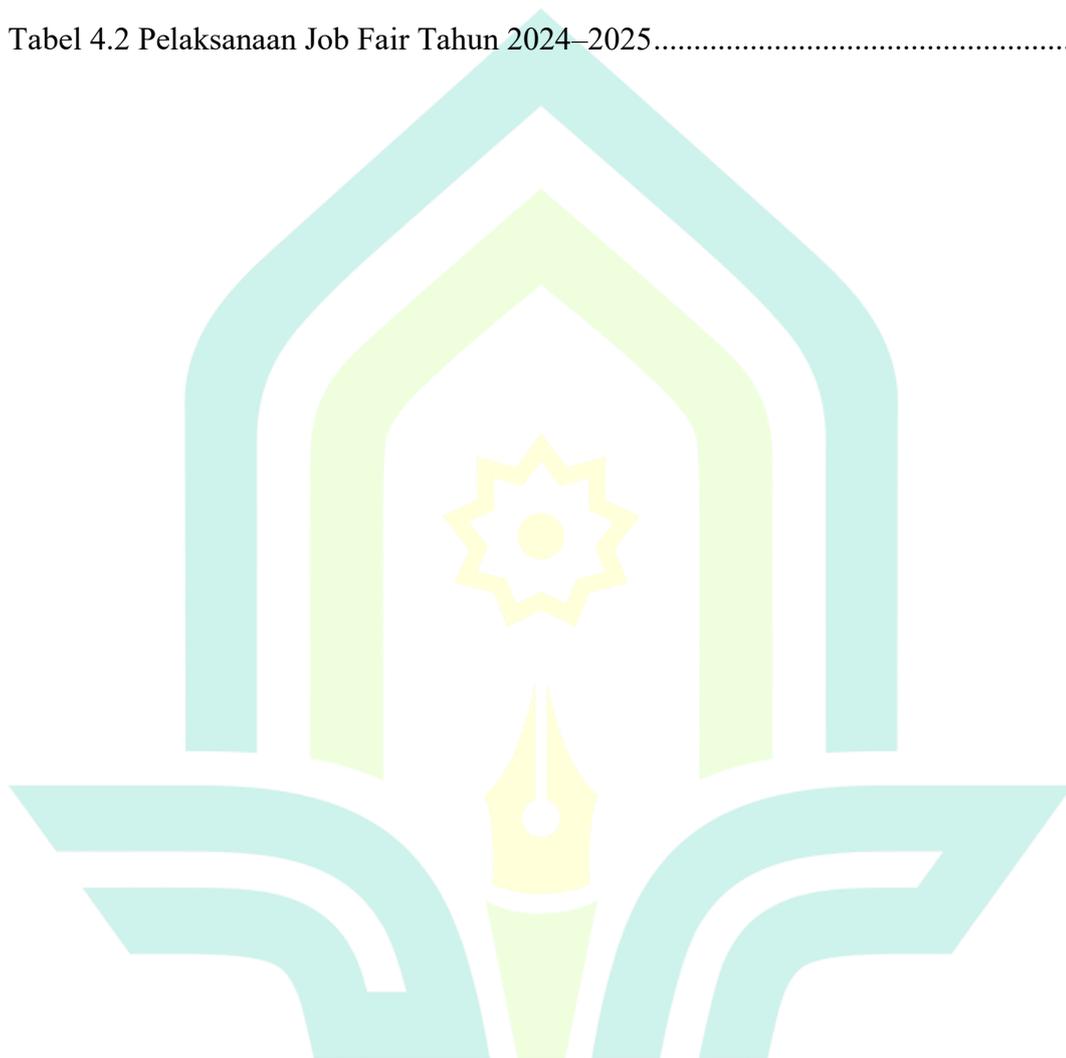
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10

A. Kebijakan Publik.....	10
B. Telaah Pustaka	26
C. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Setting Penelitian	33
D. Subjek Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Keabsahan Data	37
H. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kajian Tentang Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja.....	39
B. Penyusunan Agenda dan Formulasi Kebijakan.....	43
C. Adopsi dan Legitimasi Kebijakan.....	48
D. Implementasi Kebijakan.....	50
E. Evaluasi Hasil dan Efektivitas Kebijakan.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Keterbatasan Penelitian.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021–2023 di Kabupaten Pekalongan.....	2
Tabel 4.1 Peserta Pelatihan di BLK Kabupaten Pekalongan Tahun 2024–2025.....	54
Tabel 4.2 Pelaksanaan Job Fair Tahun 2024–2025.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	16
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian DinKop, UMKM, & NaKer Kabupaten Pekalongan.....	42
Gambar 4.2 Pelatihan Administrasi Perkantoran BLK Kabupaten Pekalongan 10 Maret 2016.....	42
Gambar 4.3 Website SIGAP Kabupaten Pekalongan.....	45
Gambar 4.4 Kanal Telegram dan WhatsApp DinKop, UMKM, dan NaKer Pekalongan.....	46
Gambar 4.5 Pelaksanaan Job Fair Tahun 2025.....	55
Gambar 4.6 Wawancara dengan Peserta Job Fair Tahun 2025.....	56
Gambar 4.7 Mekanisme Penggunaan Website SIGAP.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2022	I
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian	VII
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VIII
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Dinas	IX
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Stakeholder	X
Lampiran 6. Pedoman Wawancara	XI
Lampiran 6. Transkrip Wawancara.....	XII
Lampiran 7. Riwayat Hidup Penulis	XXVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2024 mencapai 147,71 juta orang (BPS, 2025). Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Jumlah penduduk yang tinggi menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia. Penduduk memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Penduduk dapat menjadi aset atau beban pembangunan. Jika memiliki kualitas tinggi, penduduk akan berkontribusi sebagai penggerak ekonomi.

Kabupaten Pekalongan terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan dikenal dengan industri batiknya yang mendunia. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor industri kreatif dan pertanian. Meski begitu, Pekalongan juga menghadapi tantangan dalam hal ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai mereka yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari seminggu, atau sedang dalam proses mencari pekerjaan (BPS, 2021). Sedangkan persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja secara

keseluruhan disebut dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) (BPS, 2021). TPT di Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2023 mencapai 3,24%. Tabel 1.1 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan. Data ini terbagi dalam kategori jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mencakup jenjang pendidikan mulai dari tidak tamat SD hingga tingkat S2. Tabel ini memberikan gambaran tentang distribusi penganggur berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 1.1 TPT berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2021-2023 di Kabupaten Pekalongan

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	2021	2022	2023
Tidak tamat SD	-	-	4
SD	19	15	19
SLTP	139	141	138
SLTA	4.205	4.949	3.579
SMK	-	-	2.060
Akademi	234	101	-
Sarjana	210	300	435
Magister	4	5	2

Sumber: BPS Tahun 2023

Diakses pada 5 Mei 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi di setiap jenjang pendidikan. Pada kelompok yang tidak tamat SD, angka pengangguran tercatat nihil pada tahun 2021

dan 2022, namun mulai muncul pada tahun 2023 dengan jumlah 4 orang. Untuk lulusan SD, jumlah pengangguran relatif stabil, yaitu 19 orang pada tahun 2021, menurun menjadi 15 orang pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 19 orang pada tahun 2023. Sementara itu, lulusan SLTP mengalami sedikit penurunan, dari 139 orang pada tahun 2021 menjadi 138 orang pada tahun 2023.

Kondisi yang lebih mencolok terjadi pada lulusan SLTA, di mana jumlah pengangguran mencapai angka tertinggi yaitu 4.949 orang pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 3.579 orang pada tahun 2023. Untuk lulusan SMK, data tidak tersedia pada tahun 2021 dan 2022, namun pada tahun 2023 terdapat 2.060 orang pengangguran dari lulusan SMK. Pada jenjang pendidikan Akademi (diploma), terdapat 234 orang pengangguran pada tahun 2021 dan menurun menjadi 101 orang pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 data tidak tersedia. Lulusan Sarjana mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 210 orang pada tahun 2021 menjadi 300 orang pada tahun 2022, dan meningkat tajam menjadi 435 orang pada tahun 2023. Untuk tingkat Magister, jumlah pengangguran relatif kecil dengan 4 orang pada tahun 2021, 5 orang pada tahun 2022, dan 2 orang pada tahun 2023.

Tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Kabupaten Pekalongan juga berkaitan dengan ketimpangan sektor industri dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak lulusan pendidikan formal yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena

keterampilan yang mereka miliki tidak sepenuhnya relevan dengan permintaan industri. Hal ini menjadi perhatian khusus karena sektor industri kreatif di Pekalongan memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja jika didukung oleh kebijakan yang tepat dalam pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi.

Semakin banyaknya penduduk yang menempuh pendidikan formal, terutama di jenjang menengah dan tinggi, turut memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Secara teori, pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Teori Capital menyatakan bahwa pengangguran tidak boleh ada dan kualitas serta kemampuan kerja seseorang dapat meningkat seiring dengan tingkat pendidikannya. Seseorang akan menerima lebih banyak uang diatas upah minimum sebagai imbalan atas pengeluaran, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan untuk melanjutkan pendidikannya karena, secara umum, orang dengan pendidikan lebih tinggi akan memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan (Sumarsono, 2009). Namun nampaknya pendidikan tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas SDM.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki kewajiban untuk mengatasi permasalahan dalam ketenagakerjaan. Merujuk pada Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, secara eksplisit mengatur hal-hal terkait ketenagakerjaan, termasuk kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan penyediaan lapangan

kerja. UU ini mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan terkait pengembangan tenaga kerja, termasuk pelatihan vokasional bagi masyarakat lokal. Selain itu, UU ini juga menekankan bahwa peran pemerintah daerah sebagai penyedia informasi pasar kerja terkait peluang kerja yang ada di daerah, serta memfasilitasi akses masyarakat terhadap peluang tersebut. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti UMKM dan industri lokal.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja (DinKop, UMKM, dan NaKer) Kabupaten Pekalongan sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Pekalongan memegang peran penting dalam urusan ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan yang menyatakan bahwa tugas DinKop, UMKM, dan NaKer adalah membantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana, Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan, DinKop, UMKM, dan NaKer Kabupaten Pekalongan bertugas memberikan penilaian dan laporan di bidang ketenagakerjaan, UMKM, dan koperasi.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja membawahi 3 sub bidang, antara lain bidang koperasi, bidang UMKM, dan bidang

Ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam operasionalnya, dinas ini memiliki fungsi meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan terkait koperasi, UMKM, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Selain itu, dinas ini juga menangani administrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dengan dukungan struktur organisasi yang mencakup sekretariat, beberapa bidang spesifik, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai fenomena pengangguran terdidik. Menurut Sumarsono dalam, (Febiana et al., 2015) yang dimaksud dengan “pengangguran terdidik” adalah angkatan kerja yang berpendidikan menengah atas, khususnya SMA/K, diploma, dan sarjana, yang tidak bekerja. Krisis ekonomi, struktur ketenagakerjaan yang tidak seimbang, permintaan terhadap jumlah dan jenis pekerja terdidik tertentu, ketidakseimbangan pasokan pekerja terdidik, dan jumlah angkatan kerja yang lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya pengangguran terdidik.

Penelitian oleh (Lestari & Amri, 2023) berjudul “Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru” menemukan bahwa tenaga kerja Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengangguran terdidik belum maksimal, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia. Persamaan dengan

penelitian oleh Lestari adalah terletak pada pemilihan Dinas Tenaga Kerja sebagai pemangku kepentingan masalah ini. Sedangkan perbedaannya pada metode yang digunakan, dimana peneliti menggunakan analisis triangulasi sumber data dengan membutuhkan pihak lain (stakeholder) sebagai verifikator sedangkan penelitian oleh Lestari tidak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Alwi, 2022), yang menghasilkan bahwa faktor penyumbang penganggur terdidik terbanyak adalah adanya pandemi covid-19. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga tidak ada upaya khusus untuk menangani pengangguran terdidik, tetapi disamakan dengan pengangguran biasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada studi kasus tempat yang dipilih. Selain itu, perbedaannya terletak pada pemilihan informan, yang mana pada penelitian sebelumnya, hanya berfokus pada lulusan mahasiswa. Sedangkan pada penelitian ini peneliti juga mengambil data pada lulusan SMK/SLTA dan berfokus pada SMK/SLTA sebagai penyumbang penganggur terdidik terbanyak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja dalam menangani kasus pengangguran terdidik di Kabupaten Pekalongan. Dengan memahami peran serta efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh dinas terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam

mengatasi pengangguran terdidik serta menciptakan lebih banyak peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja dalam proses penanganan kasus pengangguran terdidik di Kabupaten Pekalongan (ditinjau dari tahapan kebijakan publik)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menguraikan peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja dalam proses penanganan kasus pengangguran terdidik di Kabupaten Pekalongan (ditinjau dari tahapan kebijakan publik).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada DinKop, UMKM, dan NaKer dalam mengatasi masalah kependudukan.

1. Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang mengambil judul dan topik yang sejenis.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur, sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori dari penelitian, serta telaah pustaka atau penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti. seperti jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian dan metode yang digunakan, sumber data dari penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum dari lokasi penelitian atau subjek penelitian yang telah diteliti dan pembahasan dari data yang didapatkan. Pada bagian ini berisi hasil penelitian dan klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai simpulan, dan keterbatasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan telah melakukan kebijakan sesuai dengan teori oleh William Dunn tentang tahap-tahap kebijakan publik. Dinas dalam hal penyusunan, mengacu pada masalah strategis yang dihadapi yaitu masalah ketenagakerjaan berupa pengangguran. Kemudian dilakukan formulasi kebijakan oleh aktor internal dan eksternal. Aktor internal terdiri dari kepala dinas, sekretaris dinas, kepala seksi, dan staff perencana, sedangkan dari pihak eksternal ada dari DPRD sebagai perwakilan dari rakyat. Selanjutnya proses adopsi kebijakan, mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pusat, Peraturan Menteri, dan Peraturan Bupati. Tahap setelahnya yaitu implementasi. Setelah ditetapkan beberapa kebijakan, dinas kemudian mengimplementasikan kebijakan, antara lain: pelatihan BLK, *job fair*, serta website ketenagakerjaan SIGAP dinas. Terakhir, tahap evaluasi untuk mengukur keberhasilan dinas dalam mengatasi masalah di awal penyusunan, seperti pembaruan dalam sistem pendaftaran dan pemantauan peserta.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati:

Keterbatasan waktu dan cakupan wilayah: Penelitian hanya dilakukan selama kurang lebih dua belas bulan dan berfokus pada Kabupaten Pekalongan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda.

1. Jumlah dan keragaman informan: Informan yang diwawancarai terbatas pada beberapa penganggur terdidik dan pejabat di dinas terkait, sehingga belum mencakup seluruh pemangku kepentingan seperti pihak swasta, lembaga pendidikan, atau komunitas industri yang mungkin memiliki perspektif berbeda.
2. Fokus fenomenologis: Karena menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini tidak mengukur secara kuantitatif hubungan sebab-akibat antar variabel, sehingga temuan bersifat eksploratif dan memerlukan penelitian lanjutan untuk validasi empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Z. (2022). Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik Di Wilayah Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasmi.
- Arsyad, L. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : BP STIE YKPN
- Cahyaningsih, N. (2020). Pengaruh Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Capacity Building Perempuan Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.
- Ernawati, & Romika. (2014). Strategi Pemerintah dalam Memperkecil Angka Pengangguran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 1(1).
- Ester, M. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia.
- Fadmie. (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 381–393.
- Febiana Putri, R., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Gradiana, T. (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). Jurnal Politikologi, 67–79.
- <https://pekalongankab.bps.go.id/id> diakses pada 5 Mei 2025
- <https://sigap.pekalongankab.go.id/> diakses pada 15 Mei 2025
- <https://www.facebook.com/p/Balai-Latihan-Kerja-Kabupaten-Pekalongan-100091963826343/> diakses pada 5 Mei 2025
- Indayani, S., & Hartono, B. (2023). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, 18(2).
- Lestari, N. Y., & Amri, K. (2023). Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2).
- Lilis, L., Abdurrahman, A., & Nazwin, A. H. (2024). Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran di Kota Mataram. MARAS:

- Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(3), 1503–1511.
<https://doi.org/10.60126/maras.v2i3.430>
- Lipsey, G. Richard, dkk. 1992. Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mandolang, Y. A., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Moleong, L. J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, B. (2024). Analisis Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau . (Doctoral dissertation, IPDN).
- Mustari, R., Hasanah, N., & Hidayat, R. (2024). Peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam Program Pelatihan Keterampilan Kerja. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(1), 112–120. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6690>
- Nurhasanah, D., Fahlia, F., & Ilman, A. H. (2019). PENGARUH PENDIDIKAN DAN UPAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2006-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.37673/jebi.v4i2.450>
- Nurrussyita, & Wirawan. (2025). Peran Dinas Tenaga Kerja Surakarta dalam Menekan Pengangguran Terdidik. *Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Slamet Riyadi*, 1(1), 1–10. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/12251>
- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
- Rachmasary, F. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Umkm Budi Lestari). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Rantung, M. I. R. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model. Tahta Media.
- Setyanti, A. M., & Finuliyah, F. (2022). Pengangguran Terdidik Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Pada Data Sakernas 2020. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1). <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.118>
- Soleh, A. (2017). Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(2), 83–92
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press.

- Sujianto, & Butar, H. S. (2015). Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(2).
- Sumardiningsih, S. (2004). Upaya Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 2(1).
- Sumarsono, Sony. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2010. "Pembangunan Ekonomi". Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Theory, Proses, Dan Studi Kasus*. CAPS.
- Zulkifli. (2022). Analisis Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Pengangguran di Pekanbaru. *Repository UIN Suska Riau*. <https://repository.uin-suska.ac.id/62753>



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Frida Karima
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Agustus 2003
3. Alamat Rumah : Ds. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo,
Kab. Pekalongan
4. Alamat Tinggal : Ds. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo,
Kab. Pekalongan
5. Nomor Handphone : 0877 6184 0603
6. Email : fridakarima08@gmail.com
7. Nama Ayah : Mashudi
8. Pekerjaan Ayah : -
9. Nama ibu : Khanafiyah
10. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MI YMI 01 Wonopringgo (2009-2015)
2. SMP : SMP Negeri 01 Wonopringgo (2015-2018)
3. SMA : SMAN 01 Kedungwuni (2018-2021)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

DEMA FEBI UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023-2024)

Pekalongan, 4 Juni 2025